

GAMBARAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN NP SERVICES PLTU 2 AMURANG SULAWESI UTARA

Zainal Muttaqin R. Duka^{1*}, Paul A. T. Kawatu², Wulan P. J. Kaunang³

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi^{1,2,3}

*Corresponding Author : realitivirtual4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. PLN NP Services PLTU 2 Amurang, Sulawesi Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengacu pada lima elemen utama SMK3 menurut PP No. 50 Tahun 2012, yaitu penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta peninjauan dan peningkatan kinerja. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan K3 disusun oleh kantor pusat dan diimplementasikan melalui berbagai media seperti safety briefing, papan informasi, penggunaan alat pelindung diri (APD), permit kerja, serta safety induction bagi pekerja baru dan pihak eksternal. Perencanaan dilakukan setiap tahun melalui identifikasi bahaya dan penilaian risiko operasional. Dalam pelaksanaannya, perusahaan secara aktif memberikan pelatihan K3, pengawasan lapangan, serta memastikan penggunaan SOP secara konsisten. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui audit internal dan eksternal, serta pelaporan temuan melalui aplikasi IZAT yang membantu proses dokumentasi dan tindak lanjut. Perusahaan juga melaksanakan peninjauan kinerja dengan memperbarui SOP, meningkatkan kualitas pelatihan, serta menyediakan sertifikasi bagi pekerja. Keterbatasan personel K3, terutama pada shift malam, menjadi tantangan utama yang dapat mengganggu efektivitas pengawasan keselamatan kerja.

Kata kunci : keselamatan kerja, sistem manajemen kesehatan

ABSTRACT

This study aims to comprehensively describe the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) at PT. PLN NP Services PLTU 2 Amurang, North Sulawesi. Using a descriptive qualitative approach, the research refers to the five main elements of OHSMS as outlined in Indonesian Government Regulation No. 50 of 2012: policy establishment, planning, implementation, performance monitoring and evaluation, as well as review and improvement. Data were collected through structured interviews, direct field observations, and supporting documentation. The results show that occupational health and safety (OHS) policies are formulated by the central office and implemented through mechanisms such as daily safety briefings, information boards, personal protective equipment (PPE), work permits, and safety inductions for new employees and external parties. Annual planning is conducted through hazard identification and risk assessment. In implementation, the company actively provides OHS training, field supervision, and enforces the use of standard operating procedures (SOPs). Evaluation is carried out periodically through internal and external audits, along with reporting using the IZAT (Zero Accident Assistant) application to support documentation and follow-up. The company also performs regular performance reviews by updating SOPs, improving training quality, and offering safety certifications for employees. A significant challenge identified is the limited number of OHS personnel, especially during night shifts, which may hinder effective supervision. It is recommended that the company increase the number of OHS staff, expand training initiatives, and continuously improve safety infrastructure and facilities to ensure a sustainable, safe, and productive working environment.

Keywords : occupational health, safety management system

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan unsur penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia di lingkungan kerja. Dalam era industri modern yang ditandai dengan kompleksitas proses dan penggunaan teknologi tinggi, potensi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja pun semakin besar. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat individual bagi tenaga kerja, tetapi juga secara signifikan merugikan perusahaan dari sisi finansial, reputasi, dan produktivitas (Cahyo & Khairunnisa, 2017). Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen yang terstruktur dan sistematis sangat diperlukan untuk mencegah dan meminimalkan risiko tersebut. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah suatu pendekatan terencana yang menyeluruh untuk menjamin terlaksananya praktik keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta memastikan adanya pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses keselamatan kerja (Mudjimu, 2019).

SMK3 tidak hanya memenuhi aspek hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, tetapi juga menjadi indikator profesionalisme dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Data global menunjukkan urgensi penerapan SMK3 secara serius. *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan setiap tahun terdapat lebih dari 250 juta kecelakaan kerja di seluruh dunia, serta 160 juta kasus penyakit akibat kerja. Bahkan, sekitar 1,2 juta pekerja meninggal dunia setiap tahunnya akibat insiden tersebut (ILO, 2021). Di Indonesia, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah kecelakaan kerja, yaitu sebanyak 347.855 kasus pada tahun 2023 (Kemnaker RI, 2023). Angka ini merefleksikan bahwa penerapan K3 di berbagai sektor kerja, khususnya di sektor industri dengan risiko tinggi, belum sepenuhnya optimal.

Salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap bahaya kerja adalah sektor kelistrikan, khususnya pada area pembangkit tenaga listrik seperti PLTU. PT. PLN NP Services merupakan anak perusahaan dari PT. PLN Nusantara Power yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, termasuk PLTU 2 Amurang di Sulawesi Utara. PLTU ini memiliki peranan strategis dalam menyediakan kebutuhan energi listrik bagi wilayah sekitarnya dan beroperasi dengan kapasitas 2x25 MW. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 298 orang dan aktivitas operasional yang melibatkan berbagai peralatan bertegangan tinggi, panas ekstrem, dan bahan kimia, penerapan sistem K3 secara efektif menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dan tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan hasil observasi awal, PT. PLN NP Services telah memiliki sistem manajemen K3 yang dilengkapi dengan kebijakan formal, pelatihan rutin, serta audit internal yang dilakukan secara berkala. Perusahaan juga telah memperoleh sertifikasi kelaikan operasi (LAIK), yang menunjukkan bahwa secara administratif dan teknis sistem K3 telah diterapkan. Namun, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah personel K3, terutama pada shift malam, rendahnya kepatuhan terhadap penggunaan APD oleh sebagian pekerja, serta tantangan dalam menjaga kesadaran dan disiplin terhadap prosedur keselamatan, menjadi isu yang perlu ditinjau secara komprehensif.

Selain itu, dalam penerapan SMK3 dibutuhkan pendekatan partisipatif dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga pekerja di lapangan. Komitmen manajemen terhadap pengalokasian sumber daya, penguatan kebijakan, penyediaan pelatihan yang memadai, serta sistem pemantauan yang adaptif seperti penggunaan aplikasi IZAT (Zero Accident Assistant), perlu menjadi bagian integral dari strategi perusahaan dalam menciptakan budaya keselamatan kerja. Berdasarkan hal tersebut,

peneliti merasa penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai penerapan SMK3 di PT. PLN NP Services PLTU 2 Amurang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana sistem K3 dirancang, diimplementasikan, dipantau, serta ditinjau ulang untuk ditingkatkan. Dengan mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan elemen-elemen SMK3 dalam perusahaan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi praktis yang berguna dalam memperkuat efektivitas sistem keselamatan kerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur mengenai praktik manajemen K3 di sektor ketenagalistrikan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. PLN NP Services PLTU 2 Amurang. Lokasi penelitian berada di Desa Tawaang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dan dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari tiga orang: satu supervisor K3 (informan kunci), satu supervisor pemeliharaan mekanik (informan utama), dan satu petugas K3 (informan pendukung). Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode.

HASIL

Tabel 1. Karakteristik Informan Responden

Kode Informan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Pekerjaan/Jabatan	Pendidikan Terakhir
I1	39	Laki-laki	Supervisor K3	S1
I2	37	Laki-laki	Supervisor Mekanik	S1
I3	22	Perempuan	Petugas K3	S1

Hasil Wawancara Pertanyaan Pembuka

Menurut anda apa itu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja?

SMK3 adalah sistem yang dirancang untuk memastikan aktivitas kerja berjalan dengan aman, sesuai standar, dan mampu meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Di lingkungan kerja yang penuh potensi bahaya, seperti uap panas, peralatan bertegangan tinggi, dan bahan kimia, Penerapan SMK3 sangat penting untuk melindungi keselamatan pekerja sekaligus menjaga kelancaran operasional perusahaan.

Menurut anda apakah penerapan SMK3 diperusahaan ini sudah baik?

Penerapan SMK3 yang sudah baik dikarenakan perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dan juga menyediakan APD bagi pekerja, serta perusahaan juga sudah disertifikasi sebagai perusahaan yang layak operasi.

Hasil Wawancara Elemen Penetapan Kebijakan K3

Bagaimana kebijakan K3 diperusahaan ini disusun dan diterapkan untuk mendukung kesehatan dan keselamatan kerja?

Penetapan kebijakan K3 disusun langsung oleh kantor pusat dan untuk penerapannya lewat media-media K3 seperti permit, papan informasi, briefing dan penggunaan APD yang sesuai.

Apakah kebijakan yang sudah ditetapkan disebar luaskan kepada seluruh pekerja?

Kebijakan K3 merupakan hal yang harus diketahui oleh seluruh pekerja agar dapat terhindar dari kecelakaan kerja. Kebijakan K3 disebarluaskan lewat beberapa jalur informasi seperti papan informasi, pesan elektrik, pesan whatsapp dan briefing setiap pagi.

Apakah anda pernah melihat atau mendengar penyampaian terkait kebijakan K3?

Kebijakan K3 dapat diketahui lewat papan informasi, briefing pagi dan safety induction yang diikuti oleh pekerja baru, pengunjung, dan kontraktor.

Apa saja tantangan yang dihadapi terkait penetapan kebijakan K3, dan bagaimana cara menghadapi tantangan yang ada?

Tantangan yang dihadapi bisa beragam ada yang dari sisi pekerja yang sering lupa untuk tidak menggunakan APD secara lengkap ketika bekerja dan ada juga dari sisi kesadaran diri yang khawatir ketika tidak menaati kebijakan K3 yang ada dapat mengancam keselamatan dalam bekerja.

Hasil Wawancara Elemen Perencanaan K3

Apakah perusahaan memiliki perencanaan K3 yang terstruktur?

Perencanaan K3 yang ada sudah terstruktur, rencana yang dirancang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan yang melingkupi identifikasi bahaya, pengendalian risiko dan evaluasi.

Apakah anda terlibat dalam perencanaan K3?

Perencanaan K3 di perusahaan ini tidak hanya disusun oleh pihak management tapi juga melibatkan dari bidang K3 dan bidang-bidang lainnya terkait dokumentasi yang ada.

Seberapa sering perusahaan melakukan perencanaan program K3?

Perencanaan K3 di perusahaan dilakukan secara rutin setiap tahun, yang biasanya dirumuskan dalam rapat program kerja tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pola perencanaan yang terstruktur dan terjadwal untuk memastikan program K3 tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Hasil Wawancara Elemen Perencanaan K3

Bagaimana pelaksanaan rencana K3 dijalankan di perusahaan ini?

Pelaksanaan rencana K3 di perusahaan berjalan cukup baik dengan langkah-langkah seperti pelatihan, penyediaan APD, dan pengawasan harian oleh tim K3 untuk memastikan kepatuhan. Namun, masih ada keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia bersertifikasi K3, karena hanya sebagian manajemen yang memiliki sertifikasi SMK2 atau SMK3. Divisi K3 telah aktif mengatur pelaksanaan program, tetapi peningkatan sertifikasi pekerja di semua level masih perlu diperhatikan untuk mendukung penerapan K3 yang lebih optimal.

Apa langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan seluruh karyawan mematuhi prosedur K3?

Perusahaan telah menerapkan prosedur K3 dengan baik melalui langkah-langkah seperti safety induction sebelum masuk area kerja dan safety briefing setiap pagi untuk menyampaikan aturan keselamatan. Selain itu, pekerja diwajibkan mengisi permit to work sebelum memulai pekerjaan, dan tim K3 melakukan audit serta monitoring selama pekerjaan berlangsung. Di area berisiko, seperti area bising, penggunaan APD seperti earplug juga

diwajibkan. Langkah-langkah ini men unjukkan bahwa prosedur K3 diterapkan secara terstruktur untuk memini malkan risiko kecelakaan.

Hasil Wawancara Elemen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Seberapa sering perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3?

Pemantauan dan evaluasi K3 di perusahaan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan hasil rapat program kerja. Frekuensinya dapat bervariasi, mulai dari mingguan hingga per semester, tergantung pada kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, setiap dua minggu sekali, laporan terkait temuan K3, termasuk dari P2K3, dipresentasikan dan dilaporkan melalui aplikasi IZAT. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melakukan evaluasi secara rutin, tetapi juga menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan dan mengelola temuan K3, yang mendukung proses pemantauan yang lebih efisien dan terstruktur.

Menurut anda apakah evaluasi keselamatan yang dilakukan sudah cukup efektif dalam meingkatkan keselamatan di lapangan?

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di perusahaan dinilai cukup efektif. Proses ini melibatkan monitoring, pelaporan, dan tindakan perbaikan yang langsung diterapkan di lapangan. Adanya daftar kerja untuk memastikan penggunaan alat yang sesuai dan pemasangan rambu keselamatan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Evaluasi ini juga memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kekurangan dalam penerapan keselamatan kerja dan mengambil langkah perbaikan, sehingga Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat terus ditingkatkan.

Bagaimana tindak lanjut dilakukan jika ditemukan masalah atau pelanggaran keselamatan di lapangan?

Perusahaan memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran atau masalah keselamatan di lapangan. Pelanggaran akan dikenai surat peringatan (SP) sebagai sanksi disiplin, sementara temuan keselamatan dilaporkan melalui aplikasi IZAT untuk pendokumentasian dan tindak lanjut. Mekanisme ini menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga kepatuhan dan meningkatkan budaya keselamatan kerja tetap terorganisir.

Hasil Wawancara Elemen Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Bagaimana perusahaan melakukan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 untuk memastikan SMK3 tetap efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan?

Perusahaan melakukan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 melalui berbagai mekanisme untuk memastikan efektivitasnya dan kesesuaiannya dengan kebutuhan lapangan. Peninjauan dilakukan menggunakan hasil evaluasi, umpan balik dari pekerja, dan audit keselamatan internal yang rutin. Selain itu, monitoring terhadap pekerjaan dilakukan secara terus-menerus dengan sistem pelaporan yang terstruktur melalui aplikasi seperti IZAT dan grup komunikasi. Perusahaan juga menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kinerja SMK3 dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi K3 untuk meningkatkan kompetensi pekerja. Pendekatan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja secara berkelanjutan.

Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3?

Tantangan utama dalam peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 adalah terbatasnya jumlah personel K3, terutama pada shift malam, di mana hanya ada satu orang yang mengawasi. Meskipun secara umum tidak ada masalah besar, kekurangan personel ini bisa menjadi hambatan dalam memastikan pengawasan keselamatan yang maksimal.

Hasil Wawancara Elemen Pertanyaan Penutup

Menurut anda secara keseluruhan penerapan SMK3 berdampak baik bagi perusahaan?

Secara keseluruhan, penerapan SMK3 di perusahaan memberikan dampak positif yang signifikan. Hal ini terbukti dengan tercapainya sertifikasi LAIK dan peningkatan menuju penghargaan PROPER emas, yang menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan kerja sudah berjalan dengan baik. Selain itu, penerapan SMK3 juga memastikan bahwa pekerja aman dan terlindungi selama menjalankan pekerjaan.

Menurut anda apakah ada hal yang harus diperbarui atau ada saran dan masukan terkait penerapan SMK3 di perusahaan ini?

Penerapan SMK3 di perusahaan ini sudah berjalan dengan baik, tetapi beberapa saran untuk peningkatan meliputi peningkatan frekuensi safety talk, penggunaan aplikasi IZAT untuk mempermudah monitoring dan pelaporan, serta fokus pada peningkatan kualitas pekerja K3. Selain itu, penting untuk terus mengutamakan keselamatan kerja, kesehatan, dan memastikan penggunaan APD yang tepat.

PEMBAHASAN**Gambaran Penetapan Kebijakan K3**

Penetapan kebijakan adalah proses strategis dalam menentukan langkah-langkah atau aturan yang akan diberlakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini menjadi pedoman yang mengarahkan tindakan dan keputusan organisasi, baik dalam skala kecil maupun besar. Penetapan kebijakan K3 merupakan langkah awal dalam penerapan SMK3, di mana perusahaan harus meninjau kondisi K3 yang ada, meningkatkan kinerja manajemen K3, dan mempertimbangkan masukan dari pekerja atau serikat pekerja (Saptadi dan Arianto, 2020). Penerapan kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN NP Services menunjukkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, kebijakan K3 dirancang dan diterapkan melalui mekanisme yang sistematis, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan di lapangan.

Kebijakan K3 disusun langsung oleh kantor pusat PT. PLN NP Services untuk memastikan keseragaman dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Namun, di tingkat unit atau cabang, manajer bertanggung jawab menyusun komitmen K3 yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lokasi tersebut. Penerapan kebijakan dilakukan melalui berbagai media K3, seperti permit kerja, papan informasi, briefing pagi, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Menurut Robbins dan Coulter dalam Abrianto dan Yansen (2021), manajemen merupakan proses yang melibatkan koordinasi dan pengawasan kegiatan kerja orang lain, sehingga kegiatan mereka dapat diselesaikan secara efisien dan efektif untuk memastikan seluruh pekerja memahami kebijakan K3, perusahaan menyebarkanluaskannya melalui berbagai saluran komunikasi. Informasi kebijakan disampaikan lewat papan informasi, pesan elektronik, pesan WhatsApp, dan briefing pagi.

Menurut narasumber, briefing pagi menjadi salah satu cara efektif untuk mengingatkan pekerja tentang pentingnya keselamatan kerja sebelum memulai aktivitas. Selain itu, pekerja baru, pengunjung, dan kontraktor mendapatkan pemahaman tentang kebijakan K3 melalui safety induction. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi K3 diterima dan dipahami oleh seluruh pekerja. Meskipun sudah diterapkan secara menyeluruh, kebijakan K3 masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dari beberapa pekerja yang kadang lupa menggunakan APD secara lengkap saat bekerja. Selain itu, ada juga tantangan dari sisi disiplin dan rasa tanggung jawab pekerja untuk selalu mematuhi aturan K3. Hal ini penting

karena pelanggaran terhadap kebijakan K3 dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan K3.

PT. PLN NP Services mengatasi tantangan ini dengan terus meningkatkan kesadaran dan disiplin pekerja melalui edukasi, pelatihan, dan pengawasan yang konsisten. Dengan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan seluruh pihak, PT. PLN NP Services memastikan bahwa kebijakan K3 tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga diterapkan secara nyata untuk melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja.

Gambaran Perencanaan K3

Perencanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja dalam lingkungan kerja. Perencanaan K3 bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Yolanda, 2022). Perencanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN NP Services dirancang secara terstruktur untuk memastikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lingkungan perusahaan. Perencanaan ini mencakup langkah-langkah penting seperti identifikasi bahaya, pengendalian risiko, serta evaluasi berkala yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Perencanaan K3 yang terstruktur ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung operasional perusahaan secara efisien.

Proses perencanaan K3 tidak hanya disusun oleh pihak manajemen, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai bidang yang relevan, seperti tim K3 dan divisi lainnya yang berperan dalam dokumentasi terkait. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa semua aspek keselamatan kerja diperhitungkan dan diterapkan secara menyeluruh, memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan program K3 yang efektif. Perencanaan K3 dilakukan secara rutin setiap tahun melalui rapat kerja tahunan. Dalam rapat ini, perusahaan mengevaluasi pelaksanaan program K3 sebelumnya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah strategis untuk menghadapi kebutuhan operasional yang terus berkembang. Pola perencanaan ini menunjukkan adanya komitmen yang konsisten untuk menjaga relevansi dan efektivitas program K3 dalam mendukung keselamatan kerja.

Menurut penelitian (Najihah dkk, 2019), penetapan kebijakan K3 serta perencanaan K3 yang baik akan berkorelasi dengan berkurangnya angka kecelakaan kerja. Implementasi perencanaan K3 yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak terkait dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. PT. PLN NP Services melalui perencanaan K3 yang terstruktur dan kolaboratif terus berupaya mengatasi risiko kecelakaan kerja.

Gambaran Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah tahap di mana perusahaan mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah pengendalian risiko yang telah direncanakan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat (Srisantyorini dan Safitriana, 2020). Pelaksanaan rencana K3 di PT PLN NP Services dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh pekerja memahami dan mematuhi prosedur keselamatan kerja. Hal ini dicapai melalui pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan rutin yang dilakukan oleh tim K3. Setiap pekerja dan pengunjung diwajibkan mengikuti safety induction sebelum memasuki area kerja untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh terkait aturan keselamatan di lokasi kerja. Selain itu, safety talk dilaksanakan setiap pagi untuk

menyampaikan aturan spesifik yang harus diterapkan selama pekerjaan berlangsung. Perusahaan juga menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan risiko di masing-masing area kerja. Contohnya, di area dengan tingkat kebisingan tinggi, pekerja diwajibkan menggunakan earplug. Sebelum memulai pekerjaan, pekerja harus mengisi permit to work yang mencakup langkah-langkah dan prosedur keselamatan yang harus diikuti. Setelah itu, tim K3 melakukan audit dan monitoring di lokasi kerja untuk memastikan pelaksanaan prosedur telah sesuai.

Meskipun pelaksanaan rencana K3 berjalan dengan baik, terdapat keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia yang bersertifikasi di bidang K3. Hanya sebagian manajemen yang memiliki sertifikasi SMK2 atau SMK3, sehingga peningkatan kompetensi dan sertifikasi pekerja di berbagai level masih perlu diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan K3 yang lebih optimal. Langkah-langkah terstruktur ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, PT. PLN NP Services terus berupaya memastikan kesejahteraan pekerjaannya dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Gambaran Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit SMK3 oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hasil dari kegiatan ini digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan dan memastikan bahwa pelaksanaan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di perusahaan dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan hasil rapat program kerja. Frekuensinya bervariasi, mulai dari mingguan hingga per semester, tergantung kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, laporan terkait temuan K3, termasuk dari P2K3, dipaparkan setiap dua minggu sekali dan dilaporkan melalui aplikasi IZAT untuk dokumentasi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan dan mengelola temuan K3, mendukung proses pemantauan yang lebih efisien dan terstruktur.

Evaluasi keselamatan yang dilakukan di perusahaan dianggap cukup efektif dalam meningkatkan keselamatan di lapangan. Proses evaluasi ini melibatkan monitoring, pelaporan, dan tindakan perbaikan yang langsung diterapkan di lapangan. Selain itu, daftar kerja yang memastikan penggunaan alat yang sesuai dan pemasangan rambu keselamatan di area kerja juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Evaluasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam penerapan keselamatan kerja dan meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tindak lanjut terhadap masalah atau pelanggaran keselamatan di lapangan dilakukan dengan mekanisme yang jelas. Pelanggaran akan dikenakan surat peringatan (SP) sebagai sanksi disiplin, sementara temuan keselamatan langsung dilaporkan melalui aplikasi IZAT untuk tindak lanjut dan dokumentasi lebih lanjut. Mekanisme ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kepatuhan dan memperkuat budaya keselamatan kerja di lingkungan kerja.

Gambaran Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) merupakan proses evaluasi berkala terhadap implementasi SMK3 dalam suatu perusahaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem ini berjalan efektif, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. PLN NP Services dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pelaksanaan K3 berjalan efektif, relevan dengan kebutuhan operasional, dan sesuai dengan regulasi yang

berlaku. Proses ini melibatkan langkah-langkah strategis yang bertujuan menjaga keberlanjutan dan efektivitas SMK3, dengan fokus pada keselamatan pekerja dan efisiensi operasional.

Peninjauan kinerja SMK3 di PT. PLN NP Services dimulai dengan pelaksanaan audit internal yang dilakukan secara berkala. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SMK3 di seluruh unit kerja dan memastikan bahwa prosedur yang diterapkan telah memenuhi standar yang ditetapkan, seperti ISO 45001:2018. Selain audit, perusahaan secara aktif melakukan monitoring terhadap aktivitas kerja di lapangan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Monitoring ini didukung oleh pemanfaatan teknologi seperti aplikasi IZAT, yang memungkinkan pelaporan hasil monitoring dilakukan secara terstruktur dan efisien.

Hasil dari peninjauan ini kemudian digunakan untuk merumuskan langkah-langkah peningkatan kinerja SMK3. Salah satu langkah yang diambil adalah memperbarui prosedur operasi standar (SOP) berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi terbaru di lapangan. Perusahaan juga menyediakan pelatihan dan sertifikasi K3 bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas dengan aman dan sesuai prosedur. Selain itu, jika ditemukan kekurangan dalam infrastruktur K3, seperti alat keselamatan yang kurang memadai, PT. PLN NP Services mengambil tindakan untuk mengganti atau menambah fasilitas tersebut. Perusahaan juga melibatkan pekerja dalam proses ini melalui pengumpulan umpan balik. Masukan dari pekerja dianggap penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur K3 yang ada. Hal ini menunjukkan pendekatan partisipatif yang memastikan bahwa pelaksanaan SMK3 tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi juga seluruh elemen perusahaan.

Namun, proses ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah personel K3, terutama pada shift malam, di mana hanya ada satu personel K3 yang bertugas untuk mengawasi aktivitas kerja. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan dan menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh perusahaan untuk memastikan implementasi SMK3 tetap optimal. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 mencakup pengukuran, analisis, dan evaluasi yang terstruktur terhadap pelaksanaan program K3. Pendekatan ini didukung oleh teori Robbins dan Coulter dalam Abrianto dan Yansen (2021) yang menekankan pentingnya evaluasi dan keterlibatan semua elemen dalam organisasi untuk memastikan keberhasilan suatu program manajemen. PT. PLN NP Services telah mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, sehingga mencerminkan komitmen mereka dalam menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta meningkatkan budaya keselamatan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penetapan Kebijakan K3 di PT. PLN NP Services disusun oleh kantor pusat untuk memastikan standar terpenuhi, sementara pelaksanaannya disesuaikan oleh manajer unit. Kebijakan ini disosialisasikan melalui permit kerja, papan informasi, briefing pagi, APD, dan safety induction bagi pekerja baru, pengunjung, dan kontraktor. Perencanaan K3 di PT. PLN NP Services dilakukan sistematis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perencanaan K3 ini mencakup identifikasi bahaya, pengendalian risiko, evaluasi rutin, dan melibatkan manajemen serta tim K3. Perencanaan K3 disusun setiap tahun melalui rapat kerja tahunan. Pelaksanaan rencana K3 di PT. PLN NP Services dilakukan dengan denagn langkah-langkah yang meliputi pelatihan, sosialisasi, safety induction bagi pekerja dan pengunjung, serta safety talk setiap pagi.

Perusahaan juga menyediakan APD sesuai dengan risiko, menerapkan permit to work sebelum pekerjaan dimulai, dan melakukan audit serta pengawasan rutin di lokasi kerja.

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di perusahaan dilakukan terstruktur melalui pemeriksaan, pengujian, dan audit internal sesuai PP No. 50 Tahun 2012. Evaluasi dilakukan mingguan hingga per semester, dengan laporan temuan K3 yang dicatat setiap dua minggu melalui aplikasi IZAT. Proses ini mencakup monitoring, pelaporan, dan tindakan perbaikan langsung di lapangan. PT. PLN NP Services secara menyeluruh meninjau dan meningkatkan kinerja SMK3 melalui audit internal, monitoring lapangan dengan aplikasi IZAT, dan pelatihan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbarui SOP dan fasilitas K3, dengan melibatkan umpan balik pekerja. Meski menghadapi tantangan keterbatasan personel K3, perusahaan tetap berkomitmen menjaga keselamatan kerja dan membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada civitas akademika Universitas Sam Ratulangi yang telah mendukung penuh terselesaikannya artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pembimbing yang telah membantu penulis selama proses penelitian serta kepada orang tua, kakak beradik dari penulis sangat-sangat berterima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang selama ini kalian berikan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, Yansen (2021) *Analisis Pengaruh Payment, Fringe Benefits, Dan Contingent Reward, Nature Of Work Terhadap Job Performance Pada Karyawan Pt. Els*. Bachelor Thesis Thesis, Universitas Multimedia Nusantara. (Online). <https://Kc.Umn.Ac.Id/Id/Eprint/18133/>.
- Cahyo, P., & Khairunnisa, K. (2017). Pelaksanaan Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Rangka Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di Pt. Pln (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Kalimantan 4 Banjarbaru. *Kindai*, 13(1). (Online). <https://Ejournal.Stiepancasetia.Ac.Id/Kindai/Article/Download/69/57>.
- ILO. (2021). *International Labour Organization. World Statistics on Occupational Accidents and Diseases*.
- ISO 45001. (2018). *International Standard Organization 45001:2018*. (Online). <https://k3.ft.undip.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Manual-ISO-45001.pdf>.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Data Kecelakaan Kerja Tahun 2023*. Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kemnaker.
- Maulana, W. (2019). *Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Bengkel Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi, Dan Perawatan Smkn 5 Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). (Online). <https://repository.upi.edu/37256/>.
- Mudjimu, P., Kawatu, P. A., & Kaunang, W. P. (2019). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. *Kesmas*, 8(4). (Online). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23966>
- Najihah, K., Wahyuni & Nasution, R. M. (2019) . *Penetapan Kebijakan K3, Perencanaan K3 Dan Implikasinya Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Di Pks Kebun Rambutan Ptpn-lil Tebing Tinggi*. (Online). <https://Ejournal.Helvetia.Ac.Id/Index.Php/Jkg>.
- Peraturan Pemerintah RI (2012). *Pp No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

- Saptadi, J. D., & Arianto, M. E.(2020).. Evaluasi Kebijakan Dan Komitmen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Pt. Pembangunan Perumahan (Pp) Proyek Pembangunan Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 7(2).(Online). <https://Ppjp.Ulm.Ac.Id/Journal/Index.Php/Jpkmi/Article/View/11263>.
- Srisantyorini T., Safitriana e.(2020). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 Elevated. (Online). <https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Jkk/Article/Viewfile/6146/4331>
- Yolanda, E. (2022). Perencanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Pada Proyek Konstruksi Perbaikan Berat Stasiun Pandu Jungkat (Doctoral Dissertation, Universitas Tanjungpura). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmhms/article/view/57381>.